

Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur

Ayu Kusumastuti

Jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya
Email: ayukusumastuti@ub.ac.id

Abstrak

Penelitian ini melihat modal sosial terikat (*bonding*) dapat menjadi sebuah kekuatan dalam menghasilkan kapasitas adaptasi masyarakat pedesaan dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur. Pada tahap selanjutnya, kapasitas adaptasi ini menjadi sebuah daya lenting, fleksibilitas, dan stabilitas yang tinggi di dalam masyarakat jika dapat memobilisasi sumber daya dan memodifikasi kelembagaan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Pada pembangunan infrastruktur (air, listrik, dan jalan) masyarakat mengembangkan kepercayaan, interaksi yang kuat antar sesama anggota, norma/aturan yang menunjukkan tipe modal sosial *bonding*. Modal sosial yang terikat ini menghasilkan kapasitas adaptasi, antara lain berupa: kerja sama, partisipasi semua elemen masyarakat, pemanfaatan teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat, prinsip saling menjaga, dan kemampuan memobilisasi sumber daya kolektif dalam anggota kelompok. Bentuk-bentuk kapasitas adaptasi yang dikembangkan adalah sebuah daya lenting dan fleksibilitas untuk menjaga stabilitas pembangunan dan pengelolaan infrastuktur pedesaan.

Abstract

This research tried to explore bonding social capital which could be transformed to rural society adaptive capacity of infrastructure development. The adaptive capacity of society has an elastic power, flexibility, and stability in society if they can mobilize resource and modify social institution. The research conducted in Sidoasri Village, Sumbermanjing District, Malang County. This research utilized case study as qualitative approach. Data collecting used in-depth interview, and observation. The society has been developing water, electricity, road infrastructure since they has trust, strong interaction, and norm among the community members. It indicated the type of bonding social capital. This exclusive social capital has been yielding cooperation, participation, appropriate technology utilization, mutual exchanges, and mobilization of collective action. Forms of adaptive capacity which have been developed are an elastic power and flexibility to maintain rural infrastructure development.

Keywords: adaptive capacity, bridging, bonding, social capital



Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Insfrastruktur

Penulis: Ayu Kusumastuti

Dipublikasikan oleh: *LabSosio*, Pusat Kajian Sosiologi FISIP-UI

Diterima: Juli 2015; Disetujui: September 2015

MASYARAKAT, Jurnal Sosiologi, diterbitkan oleh *LabSosio*, Pusat Kajian Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. Jurnal ini menjadi media informasi dan komunikasi dalam rangka pengembangan sosiologi di Indonesia. Redaksi MASYARAKAT mengundang para sosiolog, peminat sosiologi dan para mahasiswa untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif demi pengembangan sosiologi di Indonesia. Untuk kriteria dan panduan penulisan artikel maupun resensi buku, silahkan kunjungi tautan berikut: www.journal.ui.ac.id/mjs

Untuk mengutip artikel ini (ASA Style):

Kusumastuti, Ayu. 2015. "Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Insfrastruktur."

MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 20(1):81-97.

SK Dirjen Dikti Akreditasi Jurnal No. 80/DIKTI/Kep/2012

PENDAHULUAN

Pembangunan sarana dan prasarana fisik di lingkungan desa, terutama akses perhubungan dan transportasi, masih perlu diperhatikan. Infrastruktur jalan di pedesaan masih memerlukan penataan pembangunan yang lebih baik untuk menambah jenis permukaan aspal untuk memudahkan mobilitas penduduk guna mengembangkan potensi ekonomi setempat. Menurut data Statistik Potensi Desa Indonesia 2014, desa-desa di Jawa Timur yang menggunakan sarana darat melalui jenis permukaan jalan aspal berjumlah 7747 desa. Selain itu, masih terdapat 710 desa yang masih memanfaatkan jalan yang diperkeras menggunakan kerikil dan batu serta 43 desa yang masih memanfaatkan jalan tanah. Hal ini memperlihatkan bahwa infrastruktur pedesaan di Jawa Timur masih memerlukan perbaikan dan pembangunan.

Di sisi lain, pemerintah telah menggulirkan beberapa bantuan melalui program pembangunan infrastruktur pedesaan. Program nasional dan pemberdayaan banyak mengalokasikan kegiatan untuk pembangunan jalan desa. Pengelolaan ini juga didasarkan dengan partisipasi masyarakat setempat. Pengelolaan dengan mengedepankan partisipasi dipercaya akan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*). Menurut Nur, Bulkis, & Hamka (2003) diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur desa dapat berupa ide/pemikiran, tenaga, dan dana. Artinya, dalam pembangunan di pedesaan, masyarakat cenderung menerapkan prinsip bekerjasama dan gotong royong dengan berbagai macam bentuk partisipasi. Masduqi, dkk (2014) juga melakukan penelitian tentang capaian pembangunan pedesaan melalui infrastruktur air bersih. Penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan infrastruktur desa yang tidak melihat aspek partisipasi dan kerja sama masyarakat, pemerintah, dan swasta (pelaku proyek) dapat menyebabkan ketidakberhasilan program. Capaian pelayanan air bersih diperkirakan hanya 26,2%. Hal ini mengindikasikan perlunya kerja sama dan komunikasi yang berjalan antar pihak.

Di lain pihak, studi Asnudin (2010) menyatakan bahwa penyelenggaraan infrastruktur pedesaan di Sulawesi Tengah cukup fungsional dan masyarakat puas dengan kinerja teknisnya, tetapi masih rendah tingkat keberlanjutannya. Hal ini disebabkan kurangnya aspek pengorganisasian masyarakat, transparansi dan

akuntabilitas, serta berkelanjutan. Pada bagian rekomendasi dari penelitian ini terdapat solusi untuk melakukan interaksi yang komprehensif antara elemen masyarakat dan pemerintah, yaitu pemerintah harus memberikan penguatan kelembagaan masyarakat serta peningkatan ekonomi rakyat. Kajian lain dilakukan oleh Narayan & Pritchett (1999) yang menyatakan bahwa modal sosial di pedesaan Tanzania telah bermanfaat untuk penambahan pendapatan masyarakat dan berdampak cukup luas—tidak hanya segi ekonomi saja, namun juga non ekonomi seperti pengetahuan dan informasi. Pembangunan desa, dalam hal ini, juga dipengaruhi oleh modal sosial yang dimiliki masyarakat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyelenggaraan infrastruktur pedesaan yang memiliki partisipasi aktif masyarakat dapat mengefektifkan pembangunan. Selain itu, bentuk partisipasi dan kerja sama menjadi bentuk modal sosial yang dapat dikembangkan pada pembangunan pedesaan. Penelitian lain juga mengemukakan pentingnya sebuah modal sosial bagi pembangunan ekonomi dan non-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini akan mendeskripsikan sebuah tindakan sosial yang dilakukan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan pedesaan. Pada penelitian sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk melakukan pembangunan desa masyarakat melakukan serangkaian tindakan interaksi yaitu partisipasi, mengembangkan kepemilikan modal sosial, dan kerja sama. Hal tersebut adalah perilaku yang secara kolektif muncul di masyarakat. Tulisan ini akan membahas mengapa dan pada kondisi apa tindakan tersebut dapat muncul pada masyarakat pedesaan. Tulisan ini juga menjelaskan lebih lanjut bahwa tindakan kolektif yang mereka lakukan sebagai respon pembangunan adalah cara masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan dalam sistem sosial.

Tindakan kolektif yang tinggi dalam penyelesaian pembangunan bersama pada masyarakat desa tidak hadir begitu saja. Partisipasi dan kerja sama yang secara nyata terlihat pada masyarakat desa nyatanya timbul dalam kondisi modal sosial yang kuat, terlebih dahulu dalam masyarakat desa. Modal sosial ini kemudian lebih dikenal dengan modal sosial *bonding* yaitu modal sosial antara individu dalam sebuah kelompok dengan melihat orientasi ke dalam (*inward looking*). Kerja sama dan partisipasi ini terus dinamis menyesuaikan modal sosial *bonding* yang hadir di masyarakat. Implikasinya dapat disimpulkan

bahwa modal sosial yang hadir sebelum adanya tindakan kolektif merupakan mekanisme penyesuaian diri masyarakat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di luar sistem mereka. Mengacu pada Armitage dan Plummer (2010), mekanisme penyesuaian diri lebih lanjut dikatakan sebagai mekanisme adaptasi. Mekanisme ini menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai kemampuan sistem sosial secara sosial-ekologi untuk tetap siap dan tegap dalam menghadapi dan merespon perubahan dari faktor internal dan eksternal.

Upaya penciptaan perubahan dan pembangunan pedesaan, pendayagunaan infrastruktur, dan modal sosial masyarakat diperlukan untuk memicu pertumbuhan. Beberapa infrastruktur pedesaan yang berperan penting untuk pembangunan diantaranya sarana jalan dan transportasi, listrik, air, dan penggunaan teknologi dalam pertanian (Pinstrup-Andersen dan Shimokawa 2006). Hal inilah yang dilihat oleh peneliti pada Desa Sidoasri, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Daerah ini termasuk dalam kategori wilayah desa pemekaran sehingga pendayagunaan infrastruktur untuk pembangunan masih diperlukan. Tulisan ini menjelaskan bagaimana penyesuaian masyarakat muncul sebagai respon dari pembangunan yang hadir di wilayahnya. Selanjutnya, akan ditelisik bagaimana adaptasi sosial tersebut dapat muncul dan hadir di tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan observasi dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali tindakan kolektif apa saja yang dilakukan masyarakat dalam merespon pembangunan infrastruktur di pedesaan. Berikutnya, wawancara mendalam mengeksplorasi bagaimana tindakan kolektif dapat muncul di tengah masyarakat. Wawancara mendalam dilakukan terhadap sebelas informan yang dipilih dengan kriteria mereka yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan infrastruktur pedesaan. Wawancara ini juga melihat elemen pemerintah desa, masyarakat, serta pengelola langsung dari infrastruktur pedesaan. Teknik observasi digunakan untuk melihat situasi sosial dan hasil-hasil pembangunan masyarakat yang memanfaatkan partisipasi dan kerja sama masyarakat. Studi

dokumentasi dilakukan dengan telaah hasil-hasil pembangunan dan dokumen desa yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Studi dilakukan di Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

MODAL SOSIAL DAN MEKANISME ADAPTASI MASYARAKAT PEDESAAN

Modal sosial menunjuk pada segi-segi organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma, dan jaringan-jaringan sosial yang dapat memfasilitasi tindakan kolektif. Modal sosial ditekankan pada kebersamaan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup bersama dan melakukan perubahan yang lebih baik serta penyesuaian secara terus menerus. Dalam hal itu, Burt (1992) mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain sehingga menjadi kekuatan yang sangat penting, bukan hanya terhadap aspek ekonomi, tetapi juga terhadap setiap aspek eksistensi sosial yang lain.

Dimensi lain terkait modal sosial adalah tipologi modal sosial. Modal sosial dapat berbentuk *bonding* ataupun *bridging*. Modal sosial yang berbentuk *bonding* yaitu modal sosial dalam konteks ide, relasi, dan perhatian yang berorientasi ke dalam (*inward looking*). Bentuk modal sosial semacam ini umumnya muncul dan berada dalam masyarakat yang cenderung homogen. Putnam (1993) mengistilahkan masyarakat dengan *bonding social capital* sebagai ciri *sacred society*, yakni masyarakat yang terdominasi dan bertahan dengan struktur masyarakat yang totalitarian, *hierarchical*, dan tertutup oleh dogma tertentu. Pola interaksi sosial sehari-hari masyarakat semacam itu selalu dituntun oleh nilai-nilai dan norma-norma yang hanya menguntungkan level hierarki tertentu.

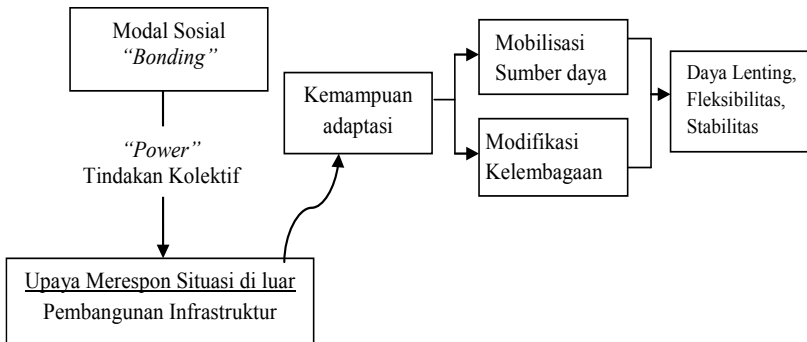
Berbeda dengan *bonding*, modal sosial yang berbentuk *bridging* bersifat inklusif dan berorientasi ke luar (*outward looking*). *Bridging social capital* ini mengarah kepada pencarian jawaban bersama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kelompok dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki individu dalam kelompok. *Bridging social capital* diasumsikan dapat menambah kontribusi bagi perkembangan pembangunan dengan melakukan kontak dan interaksi dengan kelompok di luarnya. Coleman (1999) menganggap bahwa tipologi masyarakat yang cenderung menciptakan jaringan

ke luar dalam gerakannya lebih mampu memberikan tekanan untuk melakukan upaya bersama dengan kelompok di luar mereka.

Upaya penyesuaian masyarakat memiliki daya/kapasitas adaptasi yang berbeda-beda sesuai dengan modal sosial yang dimilikinya. Kapasitas adaptif adalah kemampuan sistem sosial secara sosial-ekologi untuk tetap siap dan tegap dalam menghadapi guncangan dan merespon perubahan dari faktor internal dan eksternal (Armitage dan Plummer 2010:1). Kemampuan adaptif juga dilihat sebagai daya lenting, stabilitas, dan fleksibilitas ketahanan sistem sosial dari ancaman atau bahaya yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan (Smit dan Wandel 2006). Proses pengembangan kapasitas adaptif tersebut juga ditentukan melalui penggunaan sumber daya/potensi serta modifikasi sistem kelembagaan/aturan atau norma (Pelling dan High 2005).

Tulisan ini mengasumsikan bahwa modal sosial yang dimiliki masyarakat adalah sebuah kekuatan yang dapat digunakan untuk menstimulasi tindakan kolektif. Tindakan kolektif yang hadir dimanfaatkan untuk merespon situasi di luar masyarakat yang kemudian dikembangkan menjadi kemampuan beradaptasi.

Bagan 1. Modal Sosial Sebagai Mekanisme Kemampuan Adaptasi Masyarakat Perdesaan



Sumber: Penulis

Modal sosial menjadi kekuatan untuk dapat merespon situasi di luar masyarakat, termasuk di dalamnya merespon situasi pembangunan infrastruktur di pedesaan. Upaya merespon berupa kerja sama dan partisipasi adalah bentuk kemampuan adaptasi mereka. Kemampuan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan upaya memobilisasi sumber daya dan memodifikasi sistem kelembagaan yang ada. Kemampuan tersebut menjadi dasar kuat lemahnya daya lenting,

fleksibilitas, dan stabilitas masyarakat pedesaan dalam merespon pembangunan.

MENGUATNYA *BONDING CAPACITY* DESA SIDOASRI

Desa Sidoasri terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, wilayah paling selatan dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa ini secara langsung berbatasan dengan Samudera Indonesia. Desa ini memiliki luas lahan 1.895,60 Ha yang terdiri atas lahan sawah dan lahan kering. Lahan sawah merupakan lahan produktif yang dimanfaatkan warga untuk kegiatan pertanian seluas 268,70 Ha (BPS Kabupaten Malang 2008). Pengaspalan jalan nampaknya menjadi prioritas bagi pembangunan desa. Beberapa jalan telah diperbaiki sehingga memudahkan transportasi barang ataupun penumpang. Ketika memasuki Desa Sidoasri, kita akan menemukan empat jenis jalan, yaitu jalan aspal, jalan rabat beton, jalan makadam, dan jalan tanah. Jenis jembatan yang ada di desa berupa jembatan aspal yang sebagian besar pengerjaannya memanfaatkan program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) desa. Jembatan tersebut selain sebagai sarana transportasi, berfungsi juga sebagai saluran untuk irigasi. Terdapat tujuh jembatan yang menjadi penghubung wilayah antar desa yang pengerjaannya dilakukan oleh swadaya masyarakat dalam program PNPM.

Pembangunan infrastruktur Desa Sidoasri melibatkan banyak kalangan masyarakat. Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam sebuah pembangunan sangat tinggi, selain kerja sama yang ditunjukkan melalui gotong royong. Dalam proses pembangunan pedesaan yang berkaitan dengan infrastruktur, terdapat beberapa program terkait pembangunan, antara lain: PNPM, PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan), dan PDPT (Pengembangan Desa Pesisir Tangguh). Ketiga program di atas menjadi tumpuan masyarakat dalam melakukan kerja sama eksternal. Namun demikian, perlu disadari bahwa keberadaan ketiga program tersebut hanya sebagai legitimasi lembaga formal. Adapun keberlanjutan pengelolaan infrastruktur transportasi masyarakat lebih banyak mengembangkan kerja sama antara warga.

Kerja sama dan partisipasi antar warga ini menjadi bentuk interaksi sosial yang menguntungkan bagi pembangunan. Gotong royong, kepercayaan, dan norma yang mengatur menjadi rangkaian dari

yang hampir serupa. Ide, interaksi, dan perhatian dikembangkan dalam pembangunan mereka sendiri. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan misalnya, mereka cenderung membentuk norma dan nilai yang disepakati untuk mempertahankan struktur tertentu.

BONDING CAPACITY:
PEMBENTUKAN DAYA LENTING, FLEKSIBILITAS,
DAN STABILITAS MASYARAKAT PEDESAAN

Infrastruktur perairan di Desa Sidoasri difokuskan pada penyediaan sarana prasarana untuk air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat dan irigasi. Air bersih didapatkan dari sumber air tanah dengan membuat sumur. Sumber mata air didapatkan di daerah yang lebih tinggi dari permukiman warga dan kemudian dipasang selang air untuk menghubungkan sumber air menuju rumah warga.

Umumnya sarana dan prasarana yang digunakan warga dalam penyediaan air bersih masih sederhana. Untuk menjaga kejernihan air cukup diberi sabut kelapa sawit yang biasanya dibuat sapu ijuk untuk penyaring. Selebihnya untuk pembuatan beton juga tidak terlalu diperhatikan. Masyarakat, dengan teknologi yang sederhana, mampu memanfaatkan sumber air dengan maksimal untuk kebutuhan sehari-hari mulai dari minum, cuci, dan kakus.

“Yang dilakukan warga sekitar sini dari hasil untuk jaga air tetap bersih kita kerja bakti masyarakat sekitar sini yang pake air. Ini saja cukup dikasih sabut kelapa sawit yang biasanya dibuat sapu ijuk itu loh Mbak buat saringannya itu, ya udah gitu aja gak perlu di beton”.
(wawancara dengan Ketua RW 02 Desa Sidoasri, 30 juli 2014)

Apa yang telah dilakukan masyarakat menunjukkan upaya dan kemampuan adaptif dalam merespon kebutuhan air bersih di lingkungannya. Penggunaan teknologi sederhana, namun dengan pemanfaatan yang maksimal adalah cara mereka dalam melakukan mobilisasi sumber daya alam sekitar. Pelling dan High (2005) yang menyatakan bahwa proses pengembangan kapasitas adaptif ditentukan oleh masyarakat yang dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya/potensi di sekitar mereka.

Sabut kelapa yang banyak ditemui di lingkungan dimanfaatkan untuk mendapatkan kecukupan air bersih. Hal inilah yang menunjukkan kemampuan adaptasi masyarakat. Timbulnya daya

adaptif ini tidak muncul begitu saja namun terus dikembangkan dengan interaksi dan membagi ide antar sesama antarwarga. Daya adaptasi ini menunjukkan sebuah daya lenting dan fleksibilitas. Masyarakat dapat beradaptasi dengan penggunaan teknologi sederhana dan modal sosial yang dimiliki agar terus dapat mendayagunaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat terlibat secara langsung pada proses pembangunan penyediaan air bersih. Masyarakat juga memiliki serangkaian aturan dalam menyelenggarakan infrastruktur air. Masyarakat secara swadaya membeli selang sendiri, melapor kepada ketua RT/RW untuk disambungkan saluran airnya. Proses ini menunjukkan jaringan dan interaksi antara warga dan pimpinan wilayah setempat untuk bekerja sama dalam peyaluran air, seperti pengakuan salah satu informan:

“Mau nyalur ya beli selang sendiri nanti kalau mau pasang tinggal bilang ke saya ya sudah kita pasang selangnya, kesepakatan bersama gitu aja seperti tidak boleh merusak selang milik orang lain, memin-dah selang milik yang lain”(wawancara dengan Ketua RW 2 Desa Sidoasri, 3 Agustus 2014).

Bentuk kerja sama yang dilakukan masyarakat dalam penyediaan air bersih mengembangkan modal sosial dengan cara eksklusif/*bonding*. Sesuai dengan prinsip modal sosial ini yang memperlihatkan interaksi yang kuat dan saling percaya antara sesama anggota komunitas dengan pola interaksi sosial sehari-hari yang dituntun oleh nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati masyarakat. Indikator kepercayaan satu sama lain antar warga dapat dilihat dari warga yang mempercayakan penyediaan air bersih pada tokoh masyarakat sekitarnya. Tokoh masyarakat tersebut juga dengan sukarela membantu pemasangan saluran air.

Melalui modal kerja sama dan kepercayaan yang dibangun, masyarakat menciptakan kapasitas adaptif dalam pembangunan infrastruktur. Kapasitas adaptasi itu memunculkan bentuk-bentuk peraturan baru dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pelling dan Hall (2005) yang menyatakan bahwa proses pengembangan kapasitas adaptif dapat dilakukan dengan memodifikasi kelembagaan. Tindakan ini dengan cara berinovasi menciptakan norma dan aturan baru dalam tindakan sosial. Modifikasi kelembagaan dalam tataran norma dan nilai yang dilakukan dengan

cara saling menjaga kenyamanan satu sama lain. Semua orang dilarang memindahkan ataupun merusak *selang* (saluran air) milik orang lain untuk menjaga keberlanjutan sistem infrastruktur air dan konflik antar warga di kemudian hari.

Apa yang telah dilakukan warga dalam menjaga infrastruktur di desanya adalah bentuk kapasitas adaptif. Kapasitas adaptif ini merujuk pada sebuah pengetahuan, kemampuan menyesuaikan diri, mekanisme bertahan, dan mengatasi kendala dalam infrastruktur air. Penyediaan air bersih melalui sumber air membuat masyarakat mempunyai daya adaptif dalam menyesuaikan diri dengan kondisi infrastruktur air di daerahnya. Menyadari bahwa air ini ketersediaannya harus dapat dibagi rata tiap penduduk, maka tiap warga harus memiliki daya/kemampuan untuk saling menjaga dan tidak merusak *selang* milik warga lain. Upaya menjaga sesama warga ini membentuk daya lenting dan fleksibilitas sehingga masyarakat cenderung stabil dan terhindar dari konflik yang muncul dalam masyarakat.

TERKESAMPINGNYA MODAL SOSIAL *BRIDGING*

Di Desa Sidoasri, listrik mulai masuk desa sekitar tahun 1997. Pada waktu itu Desa Sidoasri masih menjadi bagian dari Desa Tambakasri. Penggagas dari program ini adalah Bapak A, Kepala Desa Tambakasri, desa yang bersebelahan dengan Desa Sidoasri.

Sebelum listrik masuk di desa, masyarakat menggunakan diesel yang disalurkan ke rumah-rumah. Namun tidak semua masyarakat menggunakan diesel. Hal ini disebabkan penggunaan diesel hanya mampu menanggung daya yang sedikit dan biaya yang cukup mahal. Sistem pembayarannya juga langsung dibayarkan kepada orang-orang yang memiliki diesel, biasanya masyarakat dipungut biaya Rp 3.000,00 per lampu, sedangkan jika ditambah dengan TV, maka pungutannya sebesar Rp 5.000,00 per bulan.

Ketika listrik telah masuk desa, terdapat tiga gardu listrik utama, yaitu gardu 456 yang terletak di RT 9, gardu 457 yang terletak di RT 20 dan gardu 458 yang terletak di RT 30. Proses penanganan listrik di Desa Sidoasri dikelola secara pribadi oleh masyarakat. Pemerintah Desa Sidoasri tidak ikut andil dalam pengelolaan listrik. Listrik hanya ditangani oleh tenaga teknis dan kolektor tenaga teknis yang bertugas menangani masalah pembenahan terhadap gangguan listrik rumah tangga, seperti permasalahan kabel yang rusak, ataupun orang-

orang yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kolektor merupakan orang yang bertugas sebagai penarik biaya pemakaian listrik masyarakat yang didasarkan pada perhitungan PLN.

Kolektor di Desa Sidoasri mulai menjalankan tugasnya di Desa Sidoasri sejak tahun 2000 ketika Desa Sidoasri masih menjadi bagian Desa Tambakasri. Pak B menjadi kolektor menggantikan posisi Pak S, kolektor sebelumnya yang telah meninggal. Dipilihnya Pak B sebagai kolektor karena ditunjuk oleh masyarakat dan pemerintah Desa Sidoasri. Seperti pernyataan salah satu warga: “Paknya itu gak neko-neko. Kalau megang uang dijamin bener dia itu. Bapaknya itu jujur, walau cuma SMA”. (wawancara dengan perangkat/staf Desa Sidoasri, 3 Agustus 2014)

Masyarakat memercayakan pembayaran iuran pada salah seorang warga. Kepercayaan yang dibangun tidak begitu saja terjadi, namun di dalamnya ada serangkaian proses interaksi dan menilai. Pada proses penilaian tersebut, Pak B dianggap memenuhi kriteria masyarakat sebagai petugas penarik iuran listrik yang nanti akan dibayarkan kepada PLN. Interaksi dan norma yang dibangun pada dasarnya membentuk sifat modal sosial *bonding*. Modal sosial ini berasumsi bahwa hubungan interaksi kelompok antara anggota didalamnya dimana relasi dan ide lebih berorientasi ke dalam. Masyarakat memercayakan warga mereka sendiri untuk melakukan pengelolaan pembayaran iuran listrik. Masyarakat cenderung mengembangkan interaksi dan jaringan pada mereka yang sudah menjadi anggota kelompok. Selain hal tersebut, masyarakat dalam melakukan pengelolaan listrik juga bekerja sama dengan KRW (Kebaktian Rukun Warga), sebuah komunitas agama.

“Jadi kalo misalnya ada salah satu anggota kelompok KRW yang ada kegiatan apa gitu misalnya kumpul keluarga atau tahlil gitu dan gak ada *jenset* itu dipinjami oleh gereja. Kayak acara kebaktian itu biasanya pake *jenset* KRW itu. Jadi, kelompok-kelompok KRW itu memang sangat membantu” (wawancara dengan warga sekaligus guru seni di SMP YBPK, 28 Juli 2014).

Sifat kerja sama yang kembangkan berorientasi pada relasi antar kelompok. Relasi ini, seperti contoh di atas, dikembangkan dalam kelompok ibadah di desa tersebut. Masyarakat bekerja sama dengan kelompok ibadah dalam masyarakat itu sendiri untuk merespon isu pembangunan infrastruktur listrik desa. Keberadaan kelompok ibadah

tersebut juga turut berkontribusi dalam pengelolaan infrastruktur kelistrikan di Desa Sidoasri.

Secara kolektif, keberadaan modal sosial dengan tipe inklusif sedikit tidak terlihat, di mana inklusivitas diartikan sebagai modal sosial yang berorientasi pada pengembangan interaksi dan jaringan di luar kelompok. Pencarian jawaban atas permasalahan warga biasanya cenderung menggunakan ide dan pengetahuan yang berasal dari anggota komunitas sendiri.

Pada dasarnya setiap individu/tokoh masyarakat di Desa Sidoasri mengembangkan jaringan dan interaksi di luar komunitas, namun secara kolektif jaringan tersebut dikembangkan pada tataran internal kelompok. Pada pengelolaan infrastruktur desa, masyarakat mengembangkan kontak dan relasi antara individu dalam kelompok. Kontribusi dalam pembangunan lebih dititikberatkan pada interaksi yang bersifat ke dalam. Hal ini mengakibatkan modal sosial *bridging* sedikit dikesampingkan. Tersampingnya modal sosial ini dikarenakan masyarakat lebih banyak mengaktifkan modal sosial *bonding* serta memperoleh manfaat bagi kehidupan mereka. Modal sosial ini masih diyakini sebagai upaya yang dapat menambah kontribusi bagi pengelolaan pembangunan infrastruktur desa. Seperti dicontohkan pada pengelolaan infrastruktur listrik, masyarakat akan lebih memercayakan anggota dalam komunitas yang melakukan penagihan iuran dan pembayaran ke loket listrik.

Bentuk modal sosial yang berorientasi kedalam membuat masyarakat mempunyai sebuah kekuatan untuk mengembangkan kapasitas adaptasi. Modal sosial ke dalam memungkinkan kelompok mereka mempunyai kemampuan untuk merespon situasi di luarnya dengan sigap. Kuatnya kepercayaan dalam anggota komunitas membuat masyarakat semakin mudah untuk melakukan mobilisasi sumber daya dan juga melakukan modifikasi kelembagaan, yaitu sebuah upaya untuk melakukan redefinisi atas tata aturan/norma yang berlaku di masyarakat.

Jika ada permasalahan infrastruktur kelistrikan, maka masyarakat dengan sigap melakukan daya lenting dan fleksibilitasnya, seperti memanfaatkan kerja sama dan interaksi dengan kelompok ibadah setempat. Masyarakat juga mampu melakukan mobilisasi sumber daya kolektif jika muncul permasalahan terkait jaringannya listrik, seperti tiang listrik yang sempat mengalami kerusakan.

“Tiang listrik yang di dekat sobra sana, karena PLN belum datang-datang jadinya masyarakat disini kerja bakti untuk membenahi itu. Kan masyarakat sini emang terbiasa kerjasama, orang sini itu memang kalau masalah-masalah seperti itu sangat mudah untuk digerakkan” (wawancara dengan petani, warga sekaligus kolektor listrik, 29 Juli 2014).

Cara masyarakat melakukan kerja sama dan bergerak secara kolektif dalam penyelesaian masalah infrastruktur listrik ini memperlihatkan sebuah daya adaptif mereka dalam memobilisasi sumber daya manusia. Daya adaptif inilah yang kemudian menghasilkan sebuah daya lenting dan fleksibilitas masyarakat untuk mengatasi masalah pembangunan di desanya. Masyarakat juga mengembangkan sebuah model daya lenting yang mempercayakan Pak B sebagai kolektor listrik.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa untuk pengelolaan infrastruktur listrik di Desa Sidoasri melibatkan dua aktor yaitu tenaga teknis dan kolektor. Mereka adalah tenaga lapang yang terjun langsung jika ada permasalahan listrik desa. Kolektor dan tenaga teknis selalu melakukan kerja sama dan koordinasi untuk mengatasi permasalahan listrik seperti pemadaman. Di sisi lain, jika terjadi pemadaman listrik sebenarnya bukan menjadi masalah utama warga, karena aktivitas mereka sebetulnya banyak di lakukan di perkebunan.

Secara garis besar dapat diketahui bahwa daya lenting masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur desa adalah dengan memobilisasi sumber daya kelompok dengan memanfaatkan Kebaktian Rukun Warga (KRW). Ini merupakan kerja sama yang merefleksikan modal sosial terikat (*bonding social capital*) yang lebih berorientasi ke dalam kelompok. Modifikasi kelembagaan yang dilakukan dalam upaya cara adaptif masyarakat adalah penunjukkan seorang anggota kelompok untuk dijadikan orang kepercayaan untuk mengelola iuran listrik. Orang tersebut juga diberi kepercayaan untuk dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan tenaga teknis dalam menjaga agar infrastruktur listrik dapat terus digunakan oleh masyarakat.

Hal tersebut yang kemudian menjadi sebuah daya lenting dan flesibilitas masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur listrik di desa. Daya lenting tersebut didasarkan pada hubungan dan interaksi yang terikat antar warga yang dapat menghasilkan stabilitas dalam kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Modal sosial *bonding* memiliki peran dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jalan, air bersih, dan listrik di Desa Sidoasri Kabupaten Malang. Peran modal sosial ini dijadikan sebuah kekuatan dalam merespon situasi diluar diri mereka, yaitu sebuah kapasitas adaptasi. Kekuatan/kemampuan kolektif inilah yang kemudian ditransformasikan dalam upaya memobilisasi sumber daya alam dan manusianya serta memodifikasi norma dan kelembagaan yang ada di masyarakat sehingga tercipta sebuah daya lenting masyarakat.

Dalam proses pembangunan infrastruktur berupa jalan, modal sosial berupa interaksi yang kuat antar sesama warga berkembang. Interaksi ini menghasilkan kapasitas adaptasi berupa kerja sama, partisipasi tenaga, waktu, dan materi, serta pembagian kerja laki-laki dan perempuan.

Dalam proses pembangunan infrastruktur berupa saluran air, berkembang *bonding* berupa kerja sama, kepercayaan, dan norma/aturan yang mengikat. Hal tersebut menghasilkan kapasitas adaptasi berupa pemanfaatan teknologi yang sederhana serta prinsip saling menjaga dan tidak merusak selang milik warga lain. Sementara itu, dalam proses pembangunan infrastruktur listrik berkembang kepercayaan antara warga. Kapasitas adaptasi dikembangkan dengan memobilisasi sumber daya kelompok dengan memanfaatkan Kebaktian Rukun Warga (KRW). Modifikasi kelembagaan yang dilakukan adalah penunjukkan seorang anggota kelompok untuk dijadikan orang kepercayaan untuk mengelola iuran listrik.

Pada contoh kasus di atas mengindikasikan bahwa bentuk-bentuk modal sosial berupa kepercayaan, interaksi, dan kerja sama antara anggota kelompok menjadi kekuatan untuk merespon secara kolektif pembangunan infrastruktur pedesaan. Upaya respon tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah kapasitas adaptif masyarakat. Daya lenting, fleksibilitas, dan stabilitas masyarakat dapat terbentuk apabila daya adaptif tersebut mampu memobilisasi sumber daya alam dan manusia serta memodifikasi kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas adaptasi yang dikembangkan oleh masyarakat melalui modal sosial terikat dapat mewujudkan daya lenting, fleksibilitas, dan stabilitas dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Armitage, D. R., & Plummer, R. (Eds.). 2010. *Adaptive Capacity And Environmental Governance*. Berlin, Germany: Springer
- Asnudin, Andi. 2010. Pendekatan partisipatif dalam pembangunan proyek infrastruktur Perdesaan di Indonesia. *Jurnal SMARTek* 8(3):182-170.
- BPS Kabupaten Malang. 2008. Kegiatan Pertanian.
- Burt. R.S. 1992. "Excerpt from The Sosial Structure of Competition", dalam *Structure Holes: The Social Structure of Competition*. Cambridge, MA, and London: Harvard University.
- Coleman, J. 1990. *Foundations of Social Theory*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- , 1999. *Social Capital In The Creation Of Human Capital*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- Masduqi, A., Endah, N., & Soedjono, E. S. (2008). Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan Berbasis Masyarakat: Studi Kasus HIPAM di DAS Brantas Bagian Hilir. In Naskah dipresentasikan dalam seminar nasional Pascasarjana VIII-ITS.
- Narayan, D., & Pritchett, L. (1999). Cents and sociability: Household income and social capital in rural Tanzania. *Economic development and cultural change* 47(4):871-897.
- Nur, faisal, Siti Bulkis & Hamka Naping. 2003. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa Studi Kasus: Program Alokasi Dana Desa di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba. Makasar: Jurnal Pasca Sarjana Universitas Hasanudin.
- Pelling, M., & High, C. 2005. "Understanding adaptation: What Can Social Capital Offer Assessments of Adaptive Capacity?". *Global Environmental Change* 15(4):308–319. doi:10.1016/j.gloenvcha.2005.02.001
- Pinstrup-Andersen, P., & Shimokawa, S. (2006). Rural infrastructure and agricultural development. World Bank.
- Putnam, RD. 1993. "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life". *The American Prospect* 3:35-42.
- Putnam, RD. 1995. "Bowling Alone: America's Declining Social Capital". *Journal of Democracy* 6(1):65-78.

Smit, B., & Wandel, J. 2006. "Adaptation, Adaptive Capacity and Vulnerability". *Global Environmental Change* 16(3): 282–292. doi:10.1016/j.gloenvcha.2006.03.008.